

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara dengan komposisi suku yang sangat beragam. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (*Institute of South Asian Studies*) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negara ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini telah diakui ditingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia, baik secara vertical maupun horizontal, merupakan masyarakat paling majemuk di dunia selain Amerika Serikat dan India (Pitoyo dan Triwahyudi, 2017 hlm.65)

Sifat dasar atau karakteristik masyarakat majemuk menurut Pieere L. van den Berghe dalam (Nasikun, 2013 hlm. 38-39) terdiri dari : (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. (2) Memiliki struktur sosial yang terbagai-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplemeniter. (3) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. (4) Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. (5) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. (6) Adanya dominas politik oleh suau kelompok atau kelompok-kelompok lain. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang cukup besar. Di dalam wilayah tersebut terdapat beragam suku bangsa. Papua merupakan salah satu kepulauan di Indonesia yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, diikuti dengan suku bangsa yang beragam dan potensi sumber daya alam yang besar.

Secara historis, perjalanan Papua menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami jalan yang cukup panjang dan terjal. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Papua dapat dikatakan “belum merdeka” dari kolonialisme Belanda. Masalah Papua menjadi isu

internasional berawal ketika terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Menurut Zed (2012 hlm.542-544) Pembicaraan mengenai masalah Papua merupakan masalah yang cukup berat dan harus diselesaikan tersendiri. Pihak Belanda yang dipimpin oleh Mr.J.H.Van Marsaven meyakini bahwa urusan Papua tidak akan bisa diselesaikan lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), karena tidak akan mungkin mencapai suara sebesar dua pertiga (persyaratan untuk mengubah UUD Belanda) dari kedua Dewan Parlemen yakni *de Tweede Kamer* dan *de Eerste Kamer*. Sebenarnya alasan ini merupakan akal-akalan Belanda saja, Belanda menginginkan tetap menguasai Papua sebagai simbol yang menunjukkan bahwa negeri kincir angin itu masih menguasai Indonesia. Sementara delegasi Indonesia, terutama dari pihak negara-negara Federal (BFO), menginginkan agar Papua tetap dipertahankan sebagai bagian integral dari Indonesia dan kedaulatan atas wilayah tersebut harus diserahkan bersama dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya, saat dilaksanakannya KMB. Perdebatan pun terjadi, pada akhirnya masalah Papua ini mengalami kebuntuan (*deadlock*) sehingga kedua belah pihak sepakat jika status Papua tersebut dalam waktu satu tahun harus ditentukan lebih lanjut lewat perundingan.

Dalam menyelesaikan masalah Papua, Indonesia telah menempuh tiga jalur yakni, diplomasi langsung dengan Belanda, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konfrontasi. Jalur diplomasi langsung dengan Belanda diawali dengan adanya konferensi menteri-menteri Uni Indonesia-Belanda yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret 1950. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Prof.Dr.Soepomo dengan anggota sebanyak 10 orang. Adapun delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Sebrang Lautan Mr. J.H. Maarsaven. Berdasarkan hasil perundingan yang dilakukan beberapa kali, tidak terjadi kesepakatan antara Belanda dengan Indonesia. Kedua belah menaggap bahwa wilayah Papua sebagai milik masing-masing. Bahkan Belanda melakukan tindak lebih jauh dengan cara mengubah UUD Belanda yaitu yang semula tercantum nama *Negerlandsch* diganti menjadi *Nederland Niuw-Guinea*, Belanda pun menolak melakukan perundingan dengan Indonesia (Soeharto, 2012 hlm.415-417).

Hal ini jelas merugikan pihak Indonesia, pengambilan wilayah Papua secara sepihak oleh Belanda membuat Indonesia harus mengajukan masalah ini ke Sidang Majelis umum PBB. Pada bulan September 1954, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu Mr. Sunarjo untuk pertama kalinya mengajukan masalah Papua menjadi salah satu cara Sidang Majelis Umum PBB. Masalah tersebut kemudian dibicarakan dalam komite Politik PBB. Amerika Serikat memihak kepada Belanda, namun secara resmi bersikap netral. Setelah melalui perdebatan, resolusi tersebut tidak diterima oleh PBB. Hal ini tentu menjadi pukulan yang menyakitkan bagi pihak Indonesia, sehingga mau tidak mau harus melalui jalur konfrontasi. Dalam upaya konfrontasi tersebut, Indonesia melakukan beberapa operasi militer seperti operasi Trikora, Jaya wijaya, Garuda Putih, Jatayu dan lain sebagainya. meskipun perwira Angkatan Laut Indonesia Yos Sudarso telah tewas dalam operasi ini, operasi militer ini berhasil menarik perhatian dunia Internasional dan menyudutkan Belanda. Menurut Ricklefs (2009 hlm.562-563), Amerika Serikat melakukan desakan kepada Belanda untuk melakukan perundingan dengan Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 15 Agustus 1962 telah tercapai penyelesaian masalah Papua. Pihak Belanda sepakat untuk menyerahkan wilayah Papua kepada komisi bentukan PBB pada tanggal 1 Oktober 1962. Sementara itu, komisi tersebut menyerahkan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1962. Pada akhirnya, Papua pun masuk ke dalam pangkuan Indonesia dan menjadi bagian wilayah NKRI.

Dalam rentang waktu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga penyerahan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1962, orang-orang Belanda yang tinggal di Papua telah menularkan benih-benih nasionalisme kepada masyarakat Papua, tentu benih nasionalisme itu bukan untuk mengajak berintegrasi dengan Indonesia, tetapi memisahkan diri dari Indonesia dan membuat pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda. Akibat dari adanya proses tersebut maka di Papua telah terjadi penggandaan nasionalisme. Menurut Meteray (2011 hlm.261-162) terjadinya pengagandaan nasionalisme dalam masyarakat Papua disebabkan oleh perbedaan sejarah antara masyarakat Papua dengan beberapa daerah di Indonesia, terutama dengan pulau Jawa. Kesadaran Papua akan sejarahnya sendiri terutama akibat asimilasi budaya oleh orang-orang Belanda,

AL FAJAR BIMA SAKTI, 2020

*CENDRAWASIH DI BUMI PASUNDAN : KONFLIK DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SISWA SISWA PAPUA PROGRAM ADEM (PENELITIAN ETNOGRAFI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA PADA SISWA-SISWI PAPUA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANDUNG*

berdampak pada sikap nasionalisme mereka. Hal itu dipercepat dengan adanya lembaga pendidikan rendah di bawah naungan gereja Katolik dan Protestan. Melalui sekolah-sekolah tersebut, orang Papua menjadi lebih paham dan *open minded*, sehingga kesadaran orang-orang Papua akan masalah kepapuaan menjadi lebih kritis, peka dan peduli. Selain itu, kesadaran orang-orang Papua mengenai masalah daerahnya sendiri semakin terus meningkat sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi baik dalam ruang lingkup lokal, nasional dan internasional (Materay, 2011 hlm.261-262).

Akibat dari adanya masalah historis tersebut, serta adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam seperti ketimpangan ekonomi, tidak meratanya infrastuktur dan kurangnya fasilitas pendidikan, menyebabkan sebagian orang-orang Papua hingga saat ini ingin memerdekakan daerahnya dari NKRI. Upaya untuk memerdekakan tersebut dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok separatis atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dihimpun dalam satu wadah besar yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini tentu menulai rekasi keras dari pemerintah Orde Baru. pemerintah pun melakukan militerisasi dengan dalih keamanan nasional agar Papua tidak merdeka dan berpisah dari NKRI. Konflik antara pemerintah dengan OPM merupakan sebuah bukti bahwa telah terjadi pertentangan ideologis. Konflik ideologis adalah konflik yang menentangkan suatu paham tertentu.

Memasuki era Reformasi, pendekatan secara militeristik mulai dikurangi. Pemerintah mulai membuka ruang-ruang dialog untuk mendengar keinginan dan keluhan orang-orang Papua. Bahkan kesenjangan yang ada di Papua mulai difasilitasi yang salah satunya adalah pemberian otonomi khusus (otsus). Menurut Mutaqin (2013 hlm.10) pemberian otsus bagi Provinsi Papua telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otsus adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (*service*), dan akselerasi pembangunan (*acseleration development*), serta pemberdayaan (*empowerment*) seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lain dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan rakyat Papua, maka pendidikan merupakan aspek yang cukup penting untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Menurut Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat berada pada posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil survey tersebut, indeks pembangunan manusia di Papua memang terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua mencapai 60,06. Angka ini meningkat sebesar 0,97 poin atau tumbuh 1,64 persen dibandingkan tahun 2017. IPM Papua berubah status dari kategori “rendah” menjadi kategori “sedang”. Namun meskipun mengalami kenaikan, IPM Papua masih yang paling rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi lain. Jika dibandingkan dengan provinsi Maluku Utara yang secara geografis berdekatan dengan Papua, indeks IPM nya mencapai 67,76. Begitupun dengan Maluku dengan IPM yang mencapai 68,87. Jika lebih jauh lagi, membandingkan dengan Ibukota Jakarta tentu tidak akan sebanding. Maka dengan demikian, data-data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara Ibukota negara dengan daerah Indonesia Timur, khususnya Papua (Badan Pusat Statistik Papua, 2018a hlm. 1 dan Badan Pusat Statistik, 2018b <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>).

Rendahnya IPM tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat buta huruf yang tinggi dan rendahnya kesehatan. Senada dengan itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap 27.298 responden yang terdiri dari tiga kelompok yakni dua persen penduduk Papua asli, tiga persen penduduk non-asli dan sembilan puluh lima persen penduduk luar Papua. Berdasarkan hasil survei sebanyak 44 responden menyatakan bahwa kualitas pendidikan adalah masalah utama di Papua. Hal tersebut diikuti dengan 41 persen infrastruktur serta transportasi dan 38 persen eksploitasi sumber daya alam serta investasi. Data-data tersebut menunjukkan bahwa

AL FAJAR BIMA SAKTI, 2020

*CENDRAWASIH DI BUMI PASUNDAN : KONFLIK DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SISWA SISWA PAPUA PROGRAM ADEM (PENELITIAN ETNOGRAFI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA PADA SISWA-SISWI PAPUA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANDUNG*

kesenjangan sosial, ekonomi dan pendidikan terjadi cukup tajam di Papua (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171214205030-20-262499/survei-lipi-kualitas-pendidikan-masalah-utama-papua>). Senada dengan itu, hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menyatakan bahwa angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD dan SMP (7-15 tahun) di seluruh provinsi di Indonesia sebesar 97,96 persen dengan sampel seluruh provinsi di Indonesia. APS tertinggi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan angka sebesar 99,85 persen. Sebaliknya, APS penduduk usia 7-15 tahun terendah di Papua, yaitu sebesar 81,69 persen. Selain jauh dari angka nasional, ketimpangan APS antara Papua dan provinsi lainnya juga cukup tinggi (Badan Pusat Statistik, 2018c hlm.46).

Rendahnya angka pendidikan di Papua menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah. Konflik horizontal seperti peperangan antar suku dan golongan yang disebabkan masalah internal kelompok sendiri. Konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengusaha, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang menyebabkan kemiskinan dan kecemburuan sosial. Masalah-masalah tersebut bisa terjadi karena salah satunya adalah tidak meratanya pendidikan dan kurang terselenggaranya pendidikan dengan baik. Kesenjangan pendidikan tersebut diikuti dengan angka kemiskinan yang tinggi, dan infrastruktur yang tidak merata. Perlu adanya perhatian khusus bagi masyarakat Papua dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Minimnya infrastruktur dan kurangnya fasilitas pendidikan menyebabkan pemerintahan Papua harus merancang strategi khusus agar anak-anak Papua yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia bisa merasakan nyamannya mengenyam pendidikan, layaknya orang-orang yang tinggal di daerah yang sudah relatif maju seperti Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Dalam mengatasi hal tersebut maka salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintahan Papua adalah menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintahan daerah yang relatif memiliki kualitas, kuantitas dan fasilitas pendidikan baik. Langkah ini merupakan untuk memajukan pendidikan bagi masyarakat Papua dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

AL FAJAR BIMA SAKTI, 2020

*CENDRAWASIH DI BUMI PASUNDAN : KONFLIK DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SISWA SISWA PAPUA PROGRAM ADEM (PENELITIAN ETNOGRAFI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA PADA SISWA-SISWI PAPUA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANDUNG*

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan untuk masyarakat Papua tersebut, maka pemerintah merancang Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal pemerataan kualitas pendidikan khususnya bagi anak-anak Papua terbaik, serta masyarakat yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Mereka disiapkan agar memiliki kemampuan belajar yang setara sebagaimana anak-anak yang mengenyam pendidikan di daerah yang relatif maju. Melalui program ini maka diharapkan siswa-siswa Papua memiliki kemampuan dan kompetensi untuk membangun negeri, terutama daerah mereka sendiri. ADEM merupakan sebuah program yang bisa memberikan fasilitas bagi siswa-siswi Papua agar bisa mengenyam pendidikan dengan baik, secara kualitas, kuantitas dan fasilitas. Dalam menyelenggarakan program tersebut, Pemerintahan Provinsi Papua menggelontorkan dana sebesar 11 milyar pada tahun 2018. Anggaran ini dialokasikan untuk (1) membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), (2) biaya penyelenggaraan diterima di sekolah setempat, (3) biaya hidup, (4) perjalanan pulang pergi dari daerah asal ke provinsi ke wilayah yang menjadi tujuan sekolah dan (5) biaya asuransi kesehatan (Tabitha dkk, 2018 hlm. 11-12).

Pada saat ini siswa-siswi Papua program ADEM yang mengenyam pendidikan di kota Bandung terdiri dari 87 siswa, tersebar di sembilan sekolah negeri dan swasta. Adanya program ini diharapkan masyarakat Papua bisa belajar setara dengan orang-orang yang mengenyam pendidikan di daerah yang relatif sudah cukup maju. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kualitas secara kognitif saja, tetapi lembaga pendidikan diharapkan bisa menjadi saluran untuk menumbuhkembangkan sikap, nilai dan karakter. Dalam konteksnya siswa-siswi Papua yang mengenyam pendidikan di pulau Jawa, mereka diharapkan memiliki kepekaan sosial terhadap masalah-masalah yang ada di daerah asalnya. Salah satu masalah yang berkaitan dengan wilayah Papua adalah nasionalisme, konflik dan disintegrasi bangsa. Pemberian beasiswa dalam bentuk program ADEM bukan hanya sekadar bantuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan masyarakat Papua, tetapi menjadi alat politik agar masyarakat Papua tetap menjadi

AL FAJAR BIMA SAKTI, 2020

*CENDRAWASIH DI BUMI PASUNDAN : KONFLIK DAN NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF SISWA SISWA PAPUA PROGRAM ADEM (PENELITIAN ETNOGRAFI PADA MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA PADA SISWA-SISWI PAPUA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANDUNG*

bagian NKRI. Dalam pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis melalui akun-akun sosial medianya. Para siswa Papua memiliki penggandaan nasionalisme. Dari mereka ada yang memposting bendera OPM sebagai salah satu simbol kemerdekaan. Hal ini tentu menjadi menarik, ketika siswa Papua program ADEM yang sudah dibiayai oleh negara masih memegang sikap ideologisnya di tempat bukan mereka berasal.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk memupuk rasa nasionalisme. Menurut Supardan (2011 hlm. 339) nasionalisme secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan, di mana kepentingan negara dan bangsa mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan bernegara. Dalam artian bahwa, nasionalisme mendorong suatu bangsa untuk membentuk dirinya sebagai negara. Lahirnya nasionalisme disebabkan karena adanya kebencian terhadap paham-paham yang dibawa oleh bangsa lain yang merongrong karena telah memarginalkan kebebasan dan kedaulatan suatu bangsa. Lahirnya nasionalisme disuatu wilayah disebabkan karena para pendukung nasionalisme tersebut memiliki tujuan dan masa depan yang sama, yang dibalut dengan rasa persaudaran yang mendalam. Maka dengan demikian, nasionalisme itu bukan sesuatu yang diwariskan dari masa lampau, namun sebuah “proyek bersama” untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan pengorbanan pribadi, bukan mengorbankan orang lain. Kekuatan tentang nasionalisme itu perlu dipupuk kepada setiap generasi agar fundamen persatuan yang disilakan dalam Pancasila bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, melalui realitas historis-kultural (Anderson, 1999 hlm.5 ; Supriatna, 2012 hlm.10-11).

Nasionalisme sejatinya juga dapat menjadi senjata ampuh dalam konteks kehidupan modern yang berada di tengah arus globalisasi, terutama untuk mempertahankan identitas bangsa dari gempuran budaya asing. Nasionalisme dapat berfungsi untuk memberikan garis yang jelas antara budaya bangsa yang sesuai dengan perikehidupan masyarakat Indonesiadan budaya asing yang mengurangi rasa kebangsaan secara nasional. Nasionalisme dengan demikian diharapkan menjadi filter aktif yang membentengi bangsa dari gaya hidup ala bangsalain yang

tidak sesuai bahkan tidak konstruktif bagi pembangunan karakter bangsa (Hamid, 2012 hlm 42).

Pendidikan sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki posisi yang cukup penting dan strategis dalam membangun rasa nasionalisme dan karakter siswa. Sejarah sebagai mata pelajaran dari rumpun ilmu sosial tidak hanya menyediakan fakta, kisah atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, tetapi bisa menjadi alat untuk mengajarkan nilai-nilai esensial yang menjadi inspirasi untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Beberapa sejarawan seperti Taufik Abdullah, Nugroho Notosusanto dan lain sebagainya, sepakat bahwa sejarah bukan hanya berbicara masa lalu dengan segala aktivitasnya, tetapi berfungsi untuk mengedukasi manusia melalui nilai-nilai esensial yang hidup pada masa lalu, sehingga bisa menjadi nasihat dan cerminan untuk menunjang kehidupan yang akan datang (Supardan, 2011 hlm. 309 ; Abdullah, 1985 hlm. ix).

Menurut Hasan (2008a hlm. 4-5) pendidikan sejarah memiliki potensi untuk mengembangkan semangat kebangsaan. Pengembangan semangat kebangsaan tersebut bisa melalui cerita-cerita kepahlawanan. Bahkan para ahli pun mengatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan sejarah adalah membangun semangat kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan sejarah adalah wahana atau wadah yang bisa digunakan oleh generasi muda untuk memupuk rasa kebangsaan atau nasionalisme. Selain itu, proses penanaman nilai-nilai nasionalisme bisa dilakukan dengan cara memaknai peristiwa sejarah yang terjadi di suatu wilayah yang menjadi warisan budaya masyarakatnya. Pemaknaan peristiwa sejarah secara akumulatif yang dilakukan suatu bangsa akan menghasilkan memori kolektif suatu bangsa sehingga hal itu akan memperkuat jati diri bangsa. Pendidikan sejarah memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan hal ini, pemaknaan nilai-nilai nasionalisme bisa dilakukan dengan cara memberikan pemahaman sejarah dirinya sendiri atau bangsanya sendiri. Dalam konteks siswa-siswi Papua program ADEM bisa dilakukan dengan cara mengenalkan dan mewariskan sejarah local Papua kepada siswa Papua.

Pendidikan sejarah yang harus diberikan pada jenjang SMA/ MA, harus mengarah kepada pemahaman secara mendalam berbagai peristiwa sejarah yang

dianggap penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan (Hasan, 2012 hlm. 90-91). Dengan belajar sejarah siswa-siswi Papua program ADEM diharapkan bisa memupuk nilai-nilai nasionalisme sehingga mereka bisa memandang dengan jernih masalah-masalah atau berbagai macam konflik yang terjadi di tanah Papua. Sejarah tidak hanya berbicara mengenai masa lalu, tetapi bagaimana masa lalu itu bisa menjadi pijakan untuk kehidupan saat ini, demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahli orator asal Romawi yang bernama Cicero “*historia vitae magistra*” (sejarah adalah guru kehidupan). Melalui peristiwa-peristiwa sejarah yang banyak menceritakan kegemilangan pada masa lalu, maka siswa bukan ditugaskan untuk hanya sekadar menghafal tokoh, tahun, jalannya suatu peristiwa saja, tetapi mereka bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di setiap jalannya peristiwa sejarah tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu : Bagaimana peranan dan kontribusi pendidikan sejarah terhadap cara pandang siswa-siswi Papua yang sedang mengenyam pendidikan di kota Bandung, terhadap nasionalisme dan konflik yang terjadi di daerah asalnya ? Rumusan masalah tersebut coba penulis turunkan ke dalam pertanyaan penelitian yaitu :

1. Mengapa nilai-nilai nasionalisme dan resolusi konflik pada pelajaran Sejarah perlu dikembangkan pada siswa siswi Papua Program ADEM di SMA Kota Bandung?
2. Bagaimana materi konflik dan nasionalisme dirancang dalam pembelajaran sejarah Indonesia di SMA Kota Bandung ?
3. Apa tanggapan siswa-siswi Papua yang mengenyam pendidikan di Kota Bandung tentang nilai-nilai nasionalisme dan konflik yang sedang terjadi di daerahnya ?
4. Bagaimana pendapat guru dalam mengajar siswa-siswi Papua program ADEM dalam pembelajaran sejarah Indonesia ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian secara umum adalah mendapatkan gambaran umum mengenai sikap nasionalisme dan pemaknaan konflik yang dimiliki oleh siswa-siswi Papua selama mengeyam pendidikan di Kota Bandung yang menjadi mitra kerjasama dengan Pemerintahan Provinsi Papua. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran secara empirik mengenai pengembangan nilai-nilai nasionalisme dan resolusi konflik dalam pembelajaran sejarah terhadap siswa-siswi Papua program ADEM.
2. Menelaah secara cermat mengenai rancangan pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan konflik dan nasionalisme di sekolah di Kota Bandung
3. Menganalisis tanggapan siswa-siswi Papua yang mengeyam pendidikan di Kota Bandung terhadap konflik yang ada di daerahnya.
4. Menganalisis pendapat guru dalam mengajar siswa-siswi Papua program ADEM dalam pembelajaran sejarah Indonesia ?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih secara ilmiah mengenai nilai-nilai nasionalisme yang ada di dalam diri siswa-siswi Papua selama menempuh pendidikan di Kota Bandung.
  - b. Penelitian ini bisa menjadi sumber data atau referensi bagi penelitian yang sejenis untuk memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai nasionalisme dan pemahaman konflik, yang ada di dalam diri siswa-siswi Papua selama mereka menempuh pendidikan di Kota Bandung.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah, guru dan pihak sekolah dalam merencanakan pembelajaran sejarah dan tujuan pembelajarannya.

b. Memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa, pemerintahan dan masyarakat luas tentang pentingnya nilai-nilai nasionalisme, sebagai upaya untuk membangun kesadaran sejarah melalui materi pelajaran perjuangan bangsa-bangsa. Pada akhirnya akan mengantarkan siswa menjadi orang yang bijaksana dan arif dalam memandang suatu permasalahan.